

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, Pemerintah Daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung kebijakan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya, perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Pati yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung berupa Persetujuan Bangunan Gedung sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dilakukan melalui Perizinan Berusaha sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
- e. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup diajukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
- f. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka ketentuan mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup atau upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
- g. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka kewenangan pengelolaan air tanah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin Air Tanah sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;

h. bahwa . . .

- h. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pati, maka Izin Gangguan tidak memiliki landasan hukum sehingga Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan sudah tidak sesuai dan perlu dicabut;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI PATI.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 465);
- b. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009 Nomor 628);
- c. Peraturan Bupati Pati Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 64);

d. Peraturan . . .

- d. Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 126);
- e. Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 597) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 85);
- f. Peraturan Bupati Pati Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 598);
- g. Peraturan Bupati Pati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Izin Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 36);
- h. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 12); dan
- i. Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 67),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 10 Agustus 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 10 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001